PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.1, Desember 2025

Peran Korean Chaebols dalam Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Ekonomi Korea Selatan Periode Tahun 2000-2025

Andrew Elnathan[1], Sultan Baariq Hafizh[2], Alia Rahma Putri Sinaga[3], Aisyah Aulya Rahmat[4]
[1,2,3,4]Univeristas Brawijaya
E-mail: andrewelnathan27@gmail.com[1], sultanbaariqhafizh@gmail.com[2], aliaraasinaga@gmail.com[3], aisyahaulya24@gmail.com[4]

Article History:
Received: 11 September 2025
Revised: 24 September 2025
Accepted: 01 November 2025

Keywords: *Chaebol; kebijakan luar negeri ekonomi; Asia Timur; pre-theories of foreign policy.*

Abstract: Artikel ini menganalisis peran chaebol Korea Selatan dalam membentuk kebijakan luar negeri ekonomi Korea Selatan di kawasan Asia Timur pada periode 2000–2025 dengan menggunakan kerangka pre-theories of foreign policy James N. Rosenau, yang mencakup variabel idiosinkratik, peran, pemerintahan, masyarakat, dan sistem internasional. Secara kualitatif dan berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan personal dan latar belakang pemimpin politik yang dekat dengan chaebol berkontribusi pada orientasi kebijakan ekspor dan diplomasi ekonomi yang pro-perusahaan Chaebols. Negara dan pemerintahan menyediakan kerangka institusional, insentif, serta perjanjian dagang seperti berbagai FTA yang memperluas ruang gerak chaebol di Asia Timur, sekaligus dibatasi oleh dinamika politik domestik dan mekanisme checks and balances demokratis. Di tingkat masyarakat, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nasionalisme ekonomi hidup berdampingan dengan kritik terhadap dominasi chaebol dan tuntutan keadilan distribusi. Pada level sistemik, globalisasi, rezim perdagangan internasional, serta rivalitas Amerika Serikat terhadapTiongkok membentuk konteks eksternal yang membuat kepentingan chaebol dan strategi kebijakan luar negeri Korea Selatan saling terkait erat. Temuan ini menegaskan bahwa chaebol berperan sebagai aktor non-negara kunci dalam diplomasi ekonomi Korea Selatan di Asia Timur.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1960-an, Korea Selatan mengalami transformasi ekonomi cepat melalui industrialisasi yang sangat berorientasi pada komoditas ekspornya. Transformasi ini dibangun dengan mengandalkan konglomerat yang memegang kendali atas industri besar yang berbasis kekeluargaan di Korea Selatan atau yang dikenal juga sebagai *chaebol*, seperti Samsung, Hyundai, LG, dan SK Group dan Lotte. *Chebol* menjadi pelaksana utama strategi negara dalam memulihkan kondisi ekonominya, terutama pasca Perang Korea. Pemerintah (terutama pada masa pemerintahan

Park Chung-Hee) memberikan dukungan, seperti dalam bentuk subsidi, pinjaman dan pembiayaan selektif, perlindungan pasar domestik, dan pemberian insentif ekspor, sehingga *chaebo*l berkembang menjadi aktor ekonomi dominan baik di dalam negeri maupun global (Kim, 2013).

Pada awal tahun 2000-an, terjadi *industrial upgrading* dan kenaikan biaya produksi didalam negeri yang mendorong terjadinya relokasi pabrik dan ekspansi ke sektor-sektor Industri baru dan merambat ke pasar luar negeri. Perubahan ini didorong oleh beberapa faktor seperti kejenuhan pasar domestik, kenaikan upah tenaga kerja di Korea Selatan dan upaya untuk mengatasi dampak krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 melalui restrukturisasi besar-besaran yang memaksa perusahaan untuk lebih kompetitif secara global. *Chaebol* mengalihkan orientasinya ke kawasan Asia Timur (khususnya Tiongkok, jepang dan negara-negara di Asia Tenggara) melalui investasi langsung asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) secara besar-besaran, perdagangan komponen, dan pembentukan jejaring produksi lintas batas negara (Cho, 2024). Ekspansi ini kemudian mempengaruhi pola interdependensi regional tanpa harus melalui jalur diplomasi formal antar negara. Produk akhir dari perusahaan mulai dari semikonduktor, elektronik, otomotif dan lain-lain, tidak hanya untuk pasar lokal tetapi juga diekspor ke pasar global.

Jaringan yang dibentuk dan dilakukan oleh perusahaan menciptakan struktur *Global Value chain* (GVC) yang menjadikan hubungan ekonomi antara Korea Selatan di Kawasan Asia Timur semakin dalam, bahkan ketika terjadi fluktuasi terhadap hubungan diplomasi antar negara. Hal ini menunjukkan adanya keterhubungan antara *chaebol* dan kerjasama ekonomi Korea Selatan di Asia Timur. *Chaebol* menjadi agen yang memediasi kepentingan industri perekonomian Korea Selatan dalam ekspansinya ke Asia Timur, bernegosiasi dengan pihak lain dan pemerintah lokal, membangun riset dan pengembangan ke luar negeri, administrasi, hingga mempengaruhi keputusan kebijakan ekonomi Korea Selatan (Leipziger et al., 2017) Hubungan antara pemerintah Korea Selatan dengan *chaebol* ialah hubungan yang simbiosis, dimana pemerintah membutuhkan *chaebol* untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sementara chaebol memanfaatkan dukungan yang diberikan kepadanya untuk memperluas kekuasaan ekonominya.

Sejak tahun 2000 bahkan hingga tahun 2025 saat ini, peran *chaebol* dalam kerjasama dan kebijakan luar negeri terutama dalam sektor ekonomi Korea Selatan mengalami transformasi signifikan. Hal ini menjadi penting, karena fenomena ini menunjukkan bahwa integritas ekonomi Korea Selatan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh interaksi antar-negara (pemerintah), tetapi juga dipengaruhi oleh campur tangan aktor domestik yaitu *chaebol*. Contohnya adalah pembentukan berbagai *Free Trade Agreement* (FTA) pasca tahun 2000 yang tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antarnegara, tetapi juga demi membuka akses pasar baru bagi *chaebol* (Park & Moon, 2006). Mereka nampak tidak hanya sekedar mengikuti tren globalisasi saja, tetapi secara aktif membentuk arsitektur ekonomi kawasan Asia Timur melalui lokalisasi produksi, transfer teknologi, dan integrasi pemasok lokal ke dalam rantai pasokan mereka. Dengan demikian, *chaebol* menjadi aktor non-negara yang memiliki kapabilitas dan kekuatan untuk mempengaruhi dinamika ekonomi di luar batas negara asalnya.

LANDASAN TEORI

Pre-theories of Foreign Policy

Dalam buku berjudul *"Approaches to Comparative and International Politics"* (1966) membahas terkait pengaruh internal terhadap perilaku eksternal negara. Dalam melihat hal tersebut James N. Rosenau Menawarkan sebuah pra-teori *(pre-theory)* untuk analisis kebijakan luar negeri (*foreign policy analysis).* Rosenau kemudian menguraikan pra-teori miliknya untuk analisis kebijakan luar negeri, yang mencakup lima dimensi variabel, yakni *idiosyncratic, role,*

governmental, societal, dan systemic. Rosenau kemudian menyoroti bagaimana menilai *relative potencies* dari masing-masing faktor tersebut (Rosenau, 1966).

James N. Rosenau memandang proses pengambilan keputusan sebagai kunci untuk memahami perilaku kebijakan luar negeri suatu negara. *"One of the innovative virtues of the decision-making approach was that it provided a way of empirically tracing the variable roles of domestic variables as sources of foreign-policy behavior"* (Rosenau, 1980). Rosenau menggarisbawahi bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya merupakan respons terhadap kondisi eksternal, tetapi juga hasil dari interaksi internal dan eksternal di dalam suatu negara.

Seperti yang disinggung di atas bahwa ada lima variabel yang dikemukakan Rosenau untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *foreign policy* suatu negara, yakni *idiosyncratic, role, governmental, societal, dan systemic.* Lalu apa identifikasi dari lima variabel ini? Pertama, idiosinkratik (*idiosyncratic)* dimana Rosenau menekankan kepada karakter individu, individu yang dimaksud adalah pembuat keputusan atau pemimpin dari suatu negara. Karakteristik dari seorang individu ini dianggap dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri (*foreign policy)* negara. Indikator dari variabel ini mencakup semua aspek dari seorang pembuat keputusan yang membedakan pilihan kebijakan atau perilakunya dari pembuat keputusan lainnya, termasuk nilai-nilainya *(values)*, bakatnya *(talents)*, dan pengalaman sebelumnya *(prior experiences)*. Kedua, peran *(role)* adalah bagaimana individu atau perangkat negara menjalankan perannya. Dimana individu berperilaku didasari tekanan peran yang dimilikinya, variabel ini berkaitan dengan perilaku eksternal para pejabat yang dihasilkan oleh peran yang mereka tempati *(the roles they occupy)*. Melihat perilaku yang kemungkinan besar akan terjadi terlepas dari idiosinkratik individu yang menempati peran tersebut. Ketiga, pemerintah (*governmental)* melihat situasi dimana pemerintah memegang kekuasaan untuk menjalankan kepentingan, pemerintah juga punya akses langsung berhubungan dengan penentu kebijakan luar negeri. Situasi ini membuat bagaimana pemerintah bergerak, berhubungan dengan domestik, dan pemerintahan itu sendiri bisa membatasi atau mempengaruhi pilihan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Contohnya, Dampak dari hubungan eksekutif-legislatif *(executive-legislative relations)* terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Keempat, masyarakat (*societal)* adalah bagaimana masyarakat internal yang tergolong non-pemerintah mempengaruhi perilaku eksternal negara atau dalam hal ini *foreign policy* melalui orientasi nilai utama *(major value orientations)* suatu masyarakat, tingkat persatuan nasional *(degree of national unity)*, tingkat industrialisasi *(extent of its industrialization).* Kelima, sistemik (*systemic)* ini adalah aspek *non-human environment,* lebih merujuk kepada faktor eksternal atau luar negeri yang mempengaruhi pengambilan keputusan misalnya realitas geografis *(geographical realities)*, tantangan ideologis dari calon agresor *(ideological challenges from potential aggressors).* Negara dalam struktur global punya peran dan fungsinya sendiri yang mempengaruhi cara negara bergerak. Adanya peristiwa yang terjadi di luar negeri, secara geografis maupun ideologi juga termasuk kedalaman sistemis yang mempengaruhi *foreign policy* negara (Rosenau, 1980).

Untuk merumuskan pre-teori ini Rosenau (1980) juga menyebutkan akan perlunya penilaian terhadap *relative potencies* dari masing-masing variabel, manakah set variabel yang paling berkontribusi atau seberapa besar porsi variabel tersebut dalam mempengaruhi perilaku eksternal.

Tabel 2. Pre-theories and Theories of Foreign Policy

An Abbreviated Presentation of the Author's Pre-Theory of Foreign Policy, in Which Five Sets of Variables Underlying the External Behavior of Societies Are Ranked According to Their Relative Potencies in Eight Types of Societies

Geography and physical resources	Large Country				Small Country			
State of the economy	Developed		Undeveloped		Developed		Undeveloped	
State of the polity	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed	Open	Closed
Rankings of the variables	Role Societal Governmental Systemic Idiosyncratic	Role Idiosyncratic Governmental Systemic Societal	Idiosyncratic Role Societal Systemic Governmental	Idiosyncratic Role Governmental Systemic Societal	Role Systemic Societal Governmental Idiosyncratic	Role Systemic Societal Governmental Idiosyncratic	Idiosyncratic Systemic Role Societal Governmental	Idiosyncratic Systemic Role Governmental Societal
Illustrative examples	US	U.S.S.R.	India	Red China	Holland	Czechoslovakia	Kenya	Ghana

Sumber: Rosenau, James N. "Pre-theories and theories of foreign policy." ***Approaches to comparative and international politics,*** **(1966).**

METODE PENELITIAN

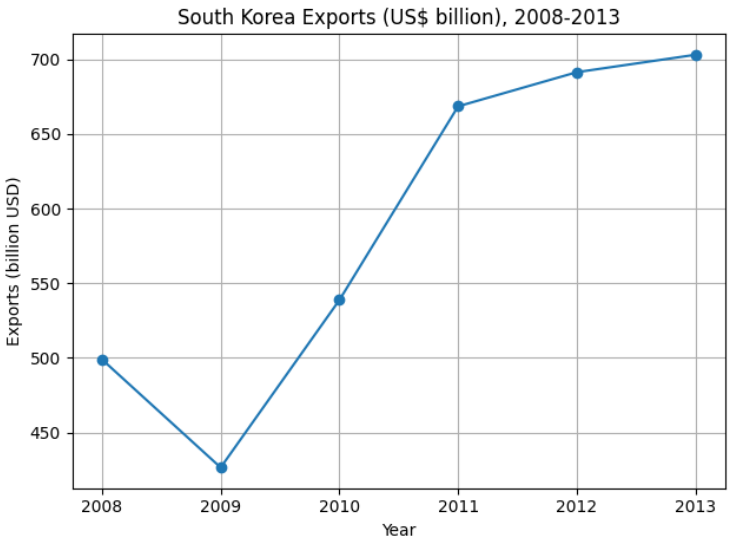
Penulis hendak melaksanakan penelitian ini menggunakan *systematic literature review* melalui pembacaan dokumen resmi dari perusahaan-perusahaan *Korean Chaebols* yang dibahas. Pertama, penulis mencari referensi di pangkalan data tepercaya serta situs resmi organisasi, dari rentang 2020–2025. Kata kunci disusun dari topik inti yaitu *Korean Chaebols* dan kebijakan luar negeri Korea Selatan dikombinasikan seperlunya. Kami hanya memasukkan karya akademik berulasan, buku ilmiah, dan dokumen kebijakan yang menjelaskan hubungan pengetahuan, nilai/norma, alat kebijakan, lalu hasil akhir. Setiap sumber yang lolos dicek mutunya (kejelasan metode, kekuatan argumen) lalu diringkas dan dikelompokkan. Tahap akhir adalah mencocokkan pola antara teori dan temuan, apakah nilai benar-benar mendorong alat, alat mengubah perilaku, dan akhirnya memunculkan hasil, serta melakukan pemeriksaan silang antar-sumber guna mengurangi bias. Dengan cara ini, metode tetap ketat secara ilmiah namun mudah ditelusuri dan diulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Idiosinkratik Chaebols *(idiosyncratic)*

Para Chaebols secara idiosinkratik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perumusan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Disandingkan dengan teori analisis Rosenau, dapat dikemukan bahwa idiosinkratik di dalam perumusan kebijakan karena para pemimpin yang mempunyai karisma, peran, pemikiran, yang menentukan kebijakan. Dalam konteks Korea Selatan pasca tahun 2000-an, variabel idiosinkratik dapat terlihat dari bagaimana dahulu Presiden Lee Mying Bak yang dahulunya adalah mantan eksekutif dari perusahaan Chaebol yaitu Hyundai membuat kebijakan luar negeri yang mendukung peningkatan bisnis dan ekspor. Lee mendorong

perjanjian dagang bebas dan diplomasi ekonomi yang membuat para Chaebol melakukan ekspansi besar-besaran ke pasar global (Rosenau, 2006). Hal ini dapat dibuktikan dari grafik berikut



Gambar 1. Peningkatan Ekspor pada Kebijakan Ekspor Lee Mying Bank
Sumber: World Bank, 2013

Lee Mying Bak bahkan membuat kebijakan luar negeri dalam manifestasinya dengan nama MBnomics sebagai strategi menguntungkan perusahaan eksportir besar yang dimiliki perusahaan Chaebol. Manifestasi ini dihasilkan dengan pemerintah yang menjaga suku bunga rendah dan membuat ekspor membengkak semakin besar agar penjualan barang dari Korea lebih kompetitif di luar negeri. Ironisnya, dalam masa peningkatan ekspor Korea asalnya 70% lebih dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Chaebol seperti Hyundai dan Samsung dan Lee sebagai idiosinkratik pemimpin Korea pada masa itu menekankan ekspor besar agar dukungan terhadap konglomerat melalui diplomasi ekonomi agar menjadi negara eksportir terkuat di Asia Timur (Kim, 2013).

Hal ini lanjut termanifestasi juga dalam bagaimana elit politik domestik dan para pimpinan Chaebol mempengaruhi keputusan diplomatik Korea Selatan. Pada tahun 2016, terwujudnya skandal Presiden Park Geun Hye, di mana terindikasi perusahaan Chaebol diduga memberikan suap membuat politikus lebih mendukung perdagangan perusahaan tersebut. Karena Park pada zaman itu menekan aksi suap yang dilakukan oleh Chaebol, Park lalu diturunkan secara tidak langsung dari jabatan presiden. Aksi ini menunjukkan bagaimana terbentuknya korelasi antara pribadi pemimpin nasional dan Chaebol yang menimbulkan gejolak politik domestik dan mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan (Kim, 2013).

Analisis Peran Negara di Regional Asia Timur *(role)*

Posisi Korea Selatan di Asia Timur memiliki posisi kekuatan ekonomi menengah pada kawasan Asia Timur (Choi, 2019). Adanya kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Korea Selatan di Asia Timur juga dipengaruhi dengan adanya dominasi Chaebol dalam perekonomian nasionalnya. Produk-produk Chaebol di Korea selatan yang memiliki dominasi secara global
meningkatkan profil dan pengaruh korea selatan di Kawasan sehingga dengan kata lain, Chaebol berhasil dalam mengokohkan peran negara Korea Selatan sebagai eksportir utama dan pemain ekonomi penting di Asia Timur yang berdampak pada kepercayaan diri negara dalam bernegosiasi

perjanjian dagang maupun memainkan peran mediasi diplomatik regional (Albert, 2018). Kebijakan luar negeri pasca 2000 secara aktif memanfaatkan posisi ini, misalnya melalui promosi *Korea Inc*. di forum-forum internasional dan penekanan pada inisiatif kerja sama ekonomi regional yang menguntungkan ekspor korea.

Pada ranah ini Korea Selatan memiliki tanggung jawab sebagai negara untuk menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar demi melindungi kepentingan ekonomi. Sebagai contoh, bagaimana korea dalam melakukan negosiasi dengan negara-negara besar, seperti Tiongkok dan Amerika hal ini juga memainkan peran penting dimana negara bertugas sebagai penghubung dan pembuka jalan diplomatik bagi ekspansi chaebol di kawasan asia timur sehingga adanya kesinambungan dari peran Chaebol yang dibantu oleh negara sebagaimana Korea selatan yang membantu juga dalam memperluas jalan bagi perusahaan Chaebol.

Peran negara dari Korea Selatan di Asia Timur tidak hanya berhenti pada peranannya sebagai pembuka jalur maupun penghubung antara negara-negara untuk perusahaan Chaebol dalam mengekspansi pengaruhnya semata, tapi adapun peranan negara lainnya, yakni sebagai penyedia dari sumber daya yang dibutuhkan oleh Chaebol dalam memperkuat industrinya. Hal inipun ditunjukkan dengan adanya pembukaan perizinan bagi investor-investor asing untuk masuk kedalam Korea Selatan dalam bentuk adanya aktivitas transfer teknologi terhadap Korea Selatan sebagai bentuk dari peningkatan persaingan ekonomi secara global juga (Aziz et al., 2025).

Analisis Peran Pemerintahan *(governmental)*

Hubungan yang terjadi antara pemerintahan Korea Selatan dengan Chaebol sudah terjadi sejak berakhirnya perang korea dan adanya kebutuhan dari pemerintahan Korea Selatan dalam memabangun kembali perekonomian negaranya. Hal tersebut pun juga mulai berlangsung semenjak pemerintahan Park Chung Hee yang mulai melakukan intervensi sekaligus pendanaan secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan chaebol (Chang, 1993). Akan tetapi sejak terjadinya krisis finansial asia tahun 1997, peran pemerintahan yang sebelumnya bersifat otoriter dimana pendanaan diberikan terhadap chaebol tanpa ada batasan, berubah pada pasca 2000 menjadi sebuah negara demokrasi presidensial yang kuat. Dengan struktur ini memungkinkan terjadinya hubungan erat antara pemerintah dan chaebol sejak era pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi korea sangat dipacu oleh kebijakan pemerintah yang agresif, dengan berbagai insentif finansial dan non-finansial bagi perusahaan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Langkah-langkah ini sejalan dengan diplomasi ekonomi agresif, termasuk percepatan FTA yang menguntungkan akses pasar bagi chaebol. Sebaliknya, pemerintahan progresif seperti Roh Moo-hyun atau Moon Jae-in cenderung lebih kritis terhadap dominasi chaebol di dalam negeri dan menjanjikan reformasi tata kelola, meskipun dalam praktiknya tetap menjadikan pertumbuhan ekspor sebagai prioritas. Struktur politik Korea dengan adanya Majelis Nasional, tekanan oposisi, dan masyarakat sipil juga membatasi sejauh mana pemerintah dapat mengakomodasi chaebol. Ratifikasi perjanjian perdagangan, misalnya, kerap menghadapi perdebatan politik di parlemen yang memaksa pemerintah menyesuaikan isi kebijakan agar lebih memperhatikan sektor domestik non-chaebol. Dengan demikian, variabel pemerintahan memengaruhi *outcome* kebijakan luar negeri, hal ini juga bisa dilihat pada peristiwa tahun 2016 hingga 2017 dimana Tiongkok yang pada saat itu memberikan sanksi terhadap perusahaan lotte group dengan adanya pemboikotan (Tias, 2021). Hal tersebut tentunya merugikan Chaebol termasuk Korea selatan itu sendiri melihat Tiongkok sebagai salah satu negara dengan penyumbang pemasukan terbanyak melalui banyaknya Chaebol yang beroperasi di Tiongkok. Pada posisi ini pemerintahan korea selatan melakukan negosiasi terhadap tiongkok dalam pengangkatan sanksi terhadap chaebol tersebut dengan maksud

mengembalikan transaksi pasar chaebol yang ada di Tiongkok (Rosyiana, 2018). Peran pemerintahan disini menunjukkan adanya dukungan institusional yang kuat dapat memperbesar pengaruh chaebol dalam diplomasi ekonomi, tetapi kontrol demokratis dan *checks and balances* mencegah kepentingan chaebol mendominasi secara absolut.

Analisis Peran Masyarakat *(societal)*

Rosenau menyatakan bahwa variabel masyarakat sebagai aspek non-pemerintah dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku eksternal negara, termasuk orientasi nilai kepentingan nasional . Di dalam Korea Selatan, sikap publik dan dinamika sosial berperan penting dalam membentuk kebijakan luar negeri dari aspek ekonomi. Masyarakat Korea dikenal sangat menghargai pertumbuhan ekonomi, namun juga semakin kritis terhadap kesenjangan dan praktik konglomerasi yang dianggap merugikan keadilan (Koo, 2010). Dari aspek historis, jikalau dikaji dari setelah krisis finansial Asia 1997, kesadaran publik terhadap sisi negatif chaebol meningkat, terutama ketika keuntungan besar chaebol tidak lagi dirasa tidak menguntungkan ekonomi domestik dan rakyat kecil Korea Selatan, kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional relatif menyusut, dan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan chaebol kembali menarik perhatian publik. Pandangan negatif ini menyebut chaebol sebagai penyebab ketimpangan pendapatan dan pelaku praktek monopoli yang menekan UMKM, sehingga memicu tuntutan masyarakat agar pemerintah mengekang dominasi chaebol. Respon pemerintah terhadap opini publik tersebut berdampak pada kebijakan luar negerinya dalam bentuk pemerintah pusat menjadi lebih berhati-hati dalam negosiasi ekonomi internasional yang berpotensi ditentang masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan misalnya isu pertanian dalam FTA, karena isunya yang kontroversi dalam aspek sosial terhadap kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan chaebol (Koo, 2010).

Selama dekade pasca 2000-an, peran masyarakat terlihat nyata dalam protes dan gerakan sosial yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri berbasis ekonomi. Tekanan masyarakat semacam ini memaksa pemerintah untuk melakukan diplomasi publik dan negosiasi ulang dalam batas tertentu, menunjukan bahwa opini publik dapat membentuk isi dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Selain itu, rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Korea dapat berperan ganda, pada satu sisi, kebanggaan nasional atas merek global Korea (Samsung, LG, Hyundai) mendukung diplomasi budaya dan ekonomi publik cenderung mendukung ekspansi chaebol yang mengharumkan nama bangsa (Kim, 2013). Di sisi lain, nasionalisme ini juga berarti masyarakat menghendaki kedaulatan ekonomi yang lebih besar, misalnya menolak dominasi investor asing atau tindakan asing yang dianggap merugikan perusahaan Korea. Pemerintah harus menimbang aspirasi ini, sehingga perjanjian internasional yang melibatkan chaebol contohnya dapat dilihat dari isu seperti penanaman modal atau akuisisi lintas negara yang kerap dipertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja lokal dan persepsi publik. Dapat diketahui bahwa variabel masyarakat opini publik, nilai-nilai nasional, dan kelompok kepentingan domestik menjadi aspek penting yang menentukan seberapa jauh kepentingan chaebol dapat mendorong atau mengubah arah kebijakan luar negeri Korea Selatan.

Analisis Sistem Internasional *(systemic)*

Menurut Rosenau, variabel sistemik mencakup faktor-faktor lingkungan eksternal non-manusia yang memengaruhi pilihan kebijakan suatu negara, misalnya kondisi geopolitik, struktur ekonomi global, atau aksi negara lain. Dalam era pasca-2000, Korea Selatan menghadapi tekanan dan peluang sistem internasional yang turut menentukan bagaimana chaebol memengaruhi kebijakan luar negerinya. Globalisasi ekonomi yang masif membuka akses pasar dan sumber daya baru bagi chaebol, sekaligus memaksa pemerintah Korea menyesuaikan kebijakan agar tetap

kompetitif (Cooper & Manyin, 2006). Studi dari Kim (2013) yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa pasca krisis Asia 1997, chaebol berhasil mengurangi rasio utang dan beralih ke industri teknologi tinggi dan terbaharui, tetapi juga semakin mendunia dalam aspek operasi mereka meningkatkan impor komponen murah dan investasi pabrik di luar negeri. Efek globalisasi ini membuat ekspor Korea semakin tergantung pada jaringan produksi internasional, sehingga kebijakan luar negeri Seoul difokuskan pada menjaga sistem perdagangan bebas dan hubungan baik dengan negara mitra dagang. Korea Selatan giat merundingkan berbagai FTA di tahun 2000-an sebagian untuk mengukuhkan posisinya dalam rantai pasok global yang melibatkan chaebol-chaebolnya. Selain itu, aturan dan norma internasional seperti kesepakatan WTO atau standar transparansi OECD, mendorong reformasi internal yang membatasi praktik anti persaingan chaebol, yang kemudian memengaruhi isi kebijakan perdagangan dan investasi luar negeri Korea yang termanifestasi misalnya komitmen meningkatkan transparansi regulasi sesuai desakan mitra dagang (Cooper & Manyin, 2006).

Faktor sistemik lain yang sangat relevan adalah dinamika geopolitik, khususnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Korea Selatan berada di tengah rivalitas dua kekuatan besar ini, dan chaebol memiliki kepentingan ekonomi besar di kedua negara. Pada pertengahan 2010-an, misalnya, pemasangan sistem anti rudal THAAD oleh Korea Selatan memicu sanksi ekonomi tidak resmi dari Tiongkok yang menyasar bisnis Korea seperti supermarket Lotte ditutup, penjualan produk hiburan dan kosmetik anjlok, serta investasi chaebol di Tiongkok terhambat. Insiden ini menyebabkan kerugian miliaran dolar dan menyoroti bagaimana tekanan sistem internasional ytang di dalam konteks ini aksi pembalasan Tiongkok, langsung memukul chaebol dan perekonomian Korea (Kim, 2013). Pemerintah Seoul terpaksa mengatur ulang kebijakan dalam bentuk menjalin dialog untuk meredakan ketegangan dengan Beijing sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi pada pasar Tiongkok. Presiden Moon Jae-in, misalnya, meluncurkan *New Southern Polic*y pada tahun 2017 untuk memperluas pasar alternatif di Asia Tenggara dan India, yang sejalan dengan upaya chaebol mendiversifikasi investasi ke kawasan tersebut. Demikian pula, ketika Amerika Serikat di era Donald Trump mendorong *supply chain decoupling* dari Tiongkok, chaebol Korea dengan dorongan dan dukungan pemerintah meningkatkan investasi di Amerika sebagai penyesuaian strategis. Jelas bahwa arsitektur sistem internasional pasca-2000 memaksa Korea Selatan menjalankan kebijakan luar negeri yang adaptif, di mana kepentingan nasional dan kepentingan chaebol saling terkait erat. Pemerintah Korea harus menavigasi aliansi keamanan dengan AS, hubungan ekonomi dengan Tiongkok, serta rezim perdagangan global secara berhati-hati agar kelangsungan dan pertumbuhan chaebol tetap terjamin tanpa mengorbankan kedaulatan ataupun keamanan nasional. Dengan kata lain, variabel sistemik dari krisis finansial global hingga rivalitas kekuatan besar menjadi konteks yang membingkai pengaruh chaebol dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam bentuk haebol mendesak negara untuk proaktif membentuk lingkungan eksternal yang kondusif bagi bisnis mereka, sementara tekanan eksternal memaksa chaebol dan negara menyesuaikan arah kebijakan demi bertahan dalam sistem internasional yang berubah. Hal ini dapat terlihat dari aspek perdagangan terhadap GPD di Korea Selatan yang terus meningkat di aspek internasional sebagai berikut:



Gambar 2. Rasio antara Perdagangan dengan GDP di Korea Selatan

Sumber: Macrotrends, 2013

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa peran *Chaebol* dalam membentuk kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam sektor ekonomi di kawasan Asia Timur pada periode waktu tahun 2000-2025 dipengaruhi oleh lima variabel. Variabel Idiosinkratik dapat dilihat dari bagaimana pada tahun 2002, seorang presiden yang dulunya berasal dari salah satu perusahaan Chaebol, dapat menentukan arah Korea Selatan untuk liberalisasi pasar dan membuka ekspor yang lebih besar. Peran negara juga terlihat dari bagaimana para Chaebols dapat mempengaruhi dewan legislasi dengan mempromosikan gagasan *Korean Inc* yang membuat Korea secara domestik menguatkan faktor produksinya dan pada akhirnya membuat Korea dan Chaebols semakin mendapatkan keuntungan ekonomi tinggi dari liberalisasi pasar. Peran masyarakat yang menyuarakan ingin membuka pasar setelah krisis finansial asia, dan sangat mendukung adanya FTA yang mengedepankan perusahaan lokal yaitu LG, Samsung, Hyundai untuk dijual juga mempengaruhi kebijakan luar negeri ekonomi Korea Selatan. Terakhir dari aspek sistem internasional, peran WTO, IMF dan poros negara Amerika Serikat cenderung membuat Korea Selatan lebih mengedepankan dan menekankan liberalisasi pasar yang mempengaruhi pula kebijakan luar negeri Korea Selatan yaitu FTA itu sendiri. Saran yang penulis berikan adalah penelitian dan riset lebih lanjut perlu dilaksanakan menggunakan metode empiris dan data primer, karena penelitian yang sifatnya *desk-review* belum cukup untuk mengetahui variabel peran masyarakat dan variabel peran sistem atau legislasi dalam negara itu sendiri.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asih Purwanti S.IP.,M.IP. karena tanpa konsultasi dari beliau, tidak akan terbit penulisan ini.

DAFTAR REFERENSI

Albert, Eleanor. "South Korea's Chaebol Challenge." Council on Foreign Relations, May 4, 2018. https://www.cfr.org/backgrounder/south-koreas-chaebol-challenge.

Aziz, Azwirda, Hamdi Nur, and Atik Paryanti. "FASE EKONOMI KOREA SELATAN MENUJU TINGGAL LANDAS DAN FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNGNYA," n.d. Accessed November 13, 2025.

Chang, Ha-Joon. "The Political Economy of Industrial Policy in Korea." *Source: Cambridge Journal of Economics* 17, no. 2 (1993).

Choi, Hee. "PUBLISHER: East Asia Foundation E Status of South Korea's Economy: A Middle-Income or a High-Income Country?," 2019.

Cooper & Manyin, "The Proposed South Korea–U.S. Free Trade Agreement (KORUS FTA)," *International Journal of Korean Studies* 10, no. 1 (2006): 129-130.

Danny Leipziger, Carl J. Dahlman, dan Shahid Yusuf, "*Economic Challenges for Korea: Mega-trends and Scenario Analyses*," KIEP (2017), 75-78, https://ssrn.com/abstract=3063810.

Eun Mee Kim, "*Big Business, Strong State: Collusion and Conflict in South Korean Development, 1960–1990"* (Albany, NY: SUNY Press, 2013).

Joan E. Cho, *"Seeds of Mobilization: The Authoritarian Roots of South Korea's Democracy"* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2024), 55-58. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/86224/9780472904037.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kim, and Keunsoo. "Chaebols and Their Effect on Economic Growth in South Korea*." *Journal of Korean Development Economic Association* 3, no. 2 (2013): 1–28.

Keunsoo Kim, "Chaebols and Their Effect on Economic Growth in South Korea," *Korean Social Sciences Review* 3, no. 2 (2013): 1-28.

Min Gyo Koo, "Embracing Free Trade Agreements, Korean Style: From Developmental Mercantilism to Developmental Liberalism (2010)

Mutmainnah, Rosyiana . "Hubungan Pemerintah Korea Selatan - Chaebol Pasca Penerapan Sanksi Tiongkok Atas Penempatan THAAD 2016-2017," December 19, 2018. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13312.

Rosenau, James N. "Pre-theories and theories of foreign policy." *Approaches to comparative and international politics,* (1966).

Rosenau, James N. "The scientific study of foreign policy." (1980).

Rosenau, *The Study of World Politics, Volume 1: Theoretical and Methodological Challenges* (London: Routledge, 2006), 172-173.

Tias, Anggraining. "South Korea and Chinese Conflict over THAAD: How It Started and the Way It Ended." *Review of International Relations* 2, no. 2 (January 31, 2021). https://doi.org/10.24252/rir.v2i2.17991.

World Bank. *Trade in Goods and Services (% of GDP) – Republic of Korea*. World Development Indicators, The World Bank Group, 2024, data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=KR

Young Bae Park and Sang Bok Moon, *"Korea's FTA Policy Structure"* (Seattle: University of Washington, 2006). https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/seoul06/papers/park-moon.pdf.